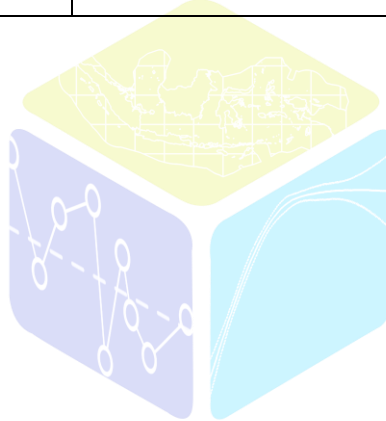


PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Adi Wijaya	Kepala Balai	LHKPN telah verifikasi KPK
2	Made Agus Dwipayana	Kasubag Umum	LHKPN telah verifikasi KPK
5	Ridla Kumara Hadi	Pejabat Pembuat Komitmen	LHKPN telah verifikasi KPK
4	Kadek Ratna Pratwi	Bendahara Pengeluaran	LHKPN telah verifikasi KPK
6	I Nyoman Suastawan	Bendahara Penerimaan	LHKPN telah verifikasi KPK



BPISDKP
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Agustus 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN****UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ADI WIJAYA**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **1023163**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/75 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 5.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 351.256.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 40.654.613****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---****Sub Total** **Rp. 796.910.613****III. HUTANG** **Rp. 168.048.453****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 628.862.160****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I MADE AGUS DWIPAYANA
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 76393

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 240.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA STYLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.993.090

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 853.593.090

III. HUTANG Rp. 583.219.581

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 270.373.509

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDLA KUMARA HADI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 467928

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	60.000.000
1. MOBIL, SUZUKI SX4 Tahun 2007, HASIL SENDIRI	Rp.	60.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.906.620
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.875.308
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	97.781.928
III. HUTANG	Rp.	357.740.121
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-259.958.193

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KADEK RATNA PRATIWI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **1033382**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 242.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO - 004 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO - 004 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.286.144

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.028.286.144

III. HUTANG Rp. 303.270.537

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 725.015.607

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I NYOMAN SUASTAWAN**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMAAN**
3. NHK : **241458**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.616.000.000**

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 810 m2/142 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, Rp. 405.000.000
4. Bangunan Seluas 142 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, Rp. 441.000.000
5. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI
Rp. 225.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000
7. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 53.420.000**

1. MOTOR, HONDA NC11A3C A/T/VARIO TEHCNO Tahun 2012,
HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 15.500.000



3. MOTOR, HONDA M1K03Q33L0 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 30.420.000
4. MOTOR, SUZUKI SPD MOTOR SOLO-004 Tahun 2006, WARISAN
Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 167.126.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.517.624

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.849.063.624

III. HUTANG Rp. 29.790.407

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.819.273.217

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.